

LAPORAN TAHUNAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Direktorat
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pelaku Usaha
Obat Tradisional,
Suplemen
Kesehatan dan
Kosmetik



KATA PENGANTAR

Atas rahmat dan karunia Tuhan yang Maha Esa, sehingga Laporan Tahunan (Laptah) Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun anggaran 2021 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan Tahunan ini merupakan salah satu bentuk publikasi kinerja, yang menggambarkan hasil kegiatan dan capaian kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, yang bersifat teknis maupun administratif.

Dengan adanya publikasi ini diharapkan dapat diidentifikasi masukan-masukan yang berguna bagi pengembangan program kegiatan demi peningkatan kontribusi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dalam program pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha Badan POM di masa mendatang. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik merupakan unit baru yang ada di tahun 2021, yang dibentuk berdasar Peraturan Badan POM nomor 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM. Bekerja dalam kondisi Tatanan Normal Baru menuntut kami untuk terus berinovasi sehingga tetap dapat menghasilkan kinerja yang optimal.

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara konsisten melakukan *continuous improvement* di berbagai bidang antara lain meningkatkan kualitas pelayanan publik, optimalisasi sumber daya, penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan manajemen sumber daya manusia dan peningkatan akuntabilitas kinerja sebagai implementasi program reformasi birokrasi pemerintah yang bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik menuju *good governance* dan *clean government*. Upaya Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik berperan dalam pemberdayaan masyarakat dengan program Badan POM Go to School/Campus untuk obat tradisional, suplemen Kesehatan dan kosmetik aman serta pemberdayaan pelaku usaha dengan pendampingan *start up*, UMKM Obat Tradisional dan UMKM Kosmetik.

Terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2021 dan semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas Pengawasan Obat dan Makanan.

Jakarta, 28 April 2022

Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha
Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik



Dra. Asih Liza Restanti, Apt., M.Kes.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel	iv
Dafar Grafik	v
Daftar Lampiran	vi
Highlight	1
Bab 1. Pendahuluan	7
A. Gambaran Umum Institusi	7
B. Struktur Organisasi dan Tupoksi	8
Bab 2. Pengelolaan Sumber Daya	12
A. Sumber Daya Manusia	12
B. Sarana dan Prasarana	14
C. Anggaran	15
Bab 3. Hasil Kegiatan	16
Bab 4. Penutup	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran	45
Lampiran	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	13
Gambar 2. Kegiatan Pendampingan Kosmetik Tematik	19
Gambar 3. Koordinasi Bersama Linsek Terkait Pemberdayaan UMKM Kosmetik BPOM	20
Gambar 4. Pembahasan Konsep Dan Peran Pemangku Kepentingan Dalam Sentra Informasi Entrepreneur Kosmetik	20
Gambar 5. Pembahasan Rencana Pendampingan Terkait Perizinan Kosmetik Kepada Pra Start Up dan Start Up Binaan LKST IPB	21
Gambar 6. FGD Program Orang Tua Angkat Jamu	26
Gambar 7. Sharing Knowledge Program Orang Tua Angkat Jamu	26
Gambar 8. Advokasi Lintas Sektor dan Bimbingan Teknis dalam Rangka Pembinaan UMKM di Bidang Obat Tradisional di Provinsi Maluku 18 – 19 Februari 2021	27
Gambar 9. Advokasi Lintas Sektor dan Bimbingan Teknis dalam Rangka Pembinaan UMKM di Bidang Obat Tradisional di Palangkaraya 17-18 Maret 2021	28
Gambar 10. Optimalisasi Pendampingan UMKM OT di Kediri 8-10 Juni 2021	28
Gambar 11. Pendampingan Jamu Gendong	30
Gambar 12. Pertemuan Bersama Fakultas Perikanan dan Kelautan IPB	32
Gambar 13. Pembahasan Kerjasama Diversifikasi Garam Menjadi Garam Kosmetik	32
Gambar 14. Kegiatan KIE Tomas	34
Gambar 15. Webinar Pra Sarasehan	37
Gambar 16. Rangkaian Pembukaan Sarasehan Jamu Nusantara	38
Gambar 17. Kegiatan Internalisasi Reformasi Birokrasi	40
Gambar 18. Kegiatan Pengembangan Kompetensi	42

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sesi sharing knowledge

25

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Komposisi ASN berdasarkan tingkat pendidikan	12
Grafik 2. Profil SDM berdasarkan Jabatan Total 32 Pegawai	13
Grafik 3. Profil SDM berdasarkan Umur	13
Grafik 4. . Kebutuhan SDM Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2021 berdasarkan Analisis Beban Kerja	14

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2021	48
Lampiran 2. Capaian Kinerja per Sasaran Strategis Tahun 2021	49
Lampiran 3. Hasil pemantauan peningkatan kompetensi minimal 20 JP pegawai tahun 2021	50
Lampiran 4. Rekap Barang Milik Negara Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2021	51

HIGHLIGHT KEGIATAN

MARET

Program “Badan POM Goes to School” dan “Badan POM Goes to Campus”



Badan POM meluncurkan program “Badan POM Goes to School” dan “Badan POM Goes to Campus” di Jakarta pada 2 Maret 2021. Bertujuan untuk menjangkau para pelajar dan mahasiswa secara langsung, Badan POM menggagas program edukasi mengenai Kosmetik Aman dan Jamu Aman. Program ini didukung oleh lintas sektor strategis seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, dan Yayasan Putri Indonesia.

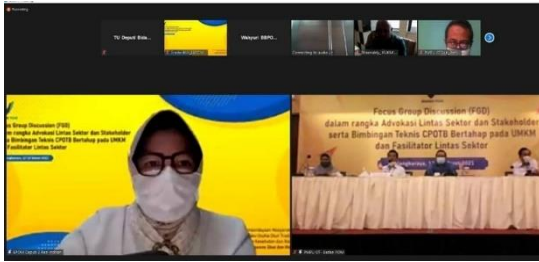


“Program Badan POM Goes to School dan Badan POM Goes to Campus merupakan upaya

pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Badan POM, khususnya bagi pelajar dan mahasiswa” ungkap Kepala Badan POM, Penny K. Lukito. Hal yang mendasari adanya program ini adalah peningkatan penggunaan teknologi informasi selama masa pandemi, yang berimbas pada derasnya arus informasi, termasuk informasi yang tidak sesuai atau hoaks terkait obat tradisional dan kosmetika. Para generasi muda menjadi salah satu sasaran utama yang rentan terpapar hoaks tersebut.

Dengan hadirnya program ini diharapkan dapat membentuk generasi muda cerdas yang dapat melindungi dirinya sendiri serta lingkungan dan komunitasnya. Semangat dan peran aktif generasi muda Indonesia sangat dibutuhkan dalam penyebaran pesan-pesan yang benar tentang keamanan, mutu, dan khasiat obat tradisional dan kosmetik.

Kegiatan pendampingan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Obat Tradisional di Palangkaraya



Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik melalui Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (PMPU OTSKK) mengadakan kegiatan pendampingan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Obat Tradisional di Palangkaraya pada tanggal 17 Maret 2021 dan 18 Maret 2021. Kegiatan ini dibuka oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara daring. Rangkaian kegiatan pendampingan UMKM Obat Tradisional ini terdiri dari Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri oleh lintas sektor terkait, Balai Besar POM di Palangkaraya (pada hari pertama) dan

Bimbingan Teknis kepada 13 (tiga belas) peserta UMKM Obat Tradisional yang ada di Kalimantan Tengah (pada hari ke dua). Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat membantu pelaku UMKM Obat Tradisional dalam mengatasi kendala/permasalahan terkait perizinan Obat Tradisional dan menambah pengetahuan tentang tata cara sertifikasi, registrasi obat tradisional serta pemenuhan CPOTB tahap I.

JUNI

Podcast “Obat Tradisional Aman dan Bermanfaat buat Bangsa”



Badan POM menjangkau generasi muda sebagai Duta Jamu Aman dalam kegiatan Podcast “Obat Tradisional Aman dan Bermanfaat buat Bangsa” di Semarang pada Selasa (15/06). Acara ini bertujuan agar penyebaran informasi mengenai obat tradisional, termasuk jamu dapat disebarkan secara menarik

dan interaktif bagi anak muda.



Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Badan POM, Reri Indriani meyakini Duta Jamu Aman dapat menjadi *spokesperson* Badan POM dalam menyebarkan informasi tentang obat tradisional yang aman, bermanfaat dan bermutu. “Kreativitas pengolahan jamu bisa menjadi peluang usaha bagi

generasi muda dengan melakukan inovasi sediaan dan packaging serta pemanfaatan teknologi informasi untuk marketing,” ungkapnya.

Podcast ini sendiri merupakan bagian dalam rangkaian kegiatan “Badan POM Goes to School” dan “Badan POM Goes to Campus” yang dimulai sejak 2 Maret 2021. Kegiatan ini bertujuan untuk terus meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya generasi muda dalam melakukan pengawasan obat dan makanan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat

SEPTEMBER

Webinar Mengenal Jamu Nusantara : Eksplorasi Obat Tradisional Berbahan Alam Indonesia



Jamu merupakan kearifan lokal serta cerminan budaya dan warisan bangsa Indonesia yang bernilai tinggi, sehingga perlu dijaga dan dilestarikan. Rabu (08/09), Badan POM mengadakan acara “Webinar Mengenal Jamu Nusantara : Eksplorasi Obat Tradisional Berbahan

Alam Indonesia”.



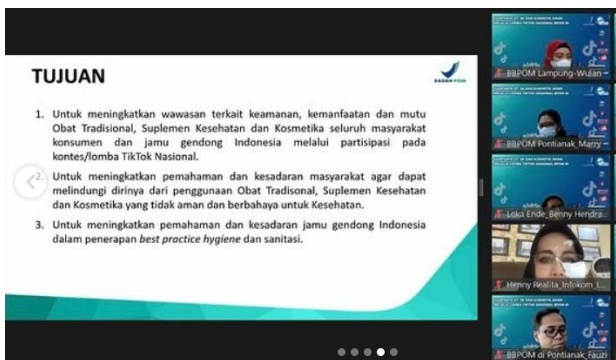
Kegiatan ini diselenggarakan untuk semakin memperkenalkan dan meningkatkan pemahaman jamu nusantara kepada masyarakat. Acara diikuti oleh ribuan peserta dari beragam latar belakang, mulai dari akedemisi, pelaku usaha, pemerintah, masyarakat umum, media, hingga selebriti.

Webinar ini merupakan rangkaian pembukaan pada kegiatan Sarasehan Jamu Nusantara : Napak Tilas Jejak Empiris Obat Tradisional Berbahan Alam Indonesia. Badan POM menginisiasi kegiatan ini dalam rangka pengembangan produk dan penelusuran data penggunaan empiris melalui dokumentasi ramuan entomedisin yang penting untuk dilakukan sebagai data bukti keamanan jamu nusantara.

Kegiatan Kampanye OT, SK dan Kosmetika Aman Melalui Lomba Tik Tok Nasional



Dalam rangka memperkuat pengawasan post market melalui program pemberdayaan masyarakat KIE berbasis digital, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (PMPU OT SK Kos) mengadakan kegiatan Kampanye OT, SK dan Kosmetika Aman Melalui Lomba Tik Tok Nasional.



Untuk menyukseskan program tersebut, dilakukan Rapat Pembahasan bersama UPT BPOM se-Indonesia pada tanggal 21 September 2021 yang dibuka oleh Deputy 2, Reri Indriani. Metodologi kegiatan

dijelaskan oleh Direktur PMPU OTSKKos, Asih Liza Restanti dan EO Motivasi Indonesia, Hamry Gusman.

Program ini menarget 4.297 masyarakat dan 1.578 lintas sektor mendapat KIE dan feed back 2.533 tik tok tentang keamanan dan manfaat OT, SK dan Kosmetika di masa pandemi. Lomba tik tok ini sudah disediakan hadiah yang banyak dan menarik. Melalui program ini diharapkan terwujud masyarakat digital anti-hoax yang terlindung dari produk yang berbahaya bagi kesehatan.

NOVEMBER

Pendampingan UMKM Jamu dan Kosmetika Menjadi Entrepreneur Mandiri dan Berdaya Saing



Badan POM berupaya mewujudkan kemandirian UMKM melalui serangkaian kegiatan “Pendampingan UMKM Jamu dan Kosmetika Menjadi Entrepreneur Mandiri dan Berdaya Saing” di Bali pada Rabu 17 November 2021. Pelaksanaan pendampingan bertujuan untuk memberi dukungan dan fasilitasi kepada UMKM di bidang produk herbal dan kosmetika

dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi di masa Pandemi Covid-19. Rangkaian acara



ini menyuguhkan launching Pedoman Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), penyerahan izin edar, dan sertifikat CPOTB dan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB), layanan desk konsultasi serta sosialisasi regulasi bagi para pelaku usaha.

Dukungan terhadap pengembangan UMKM juga dilakukan secara terkoordinasi dan bersinergi dengan seluruh sektor terkait, diantaranya Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pariwisata, dan Dinas Kesehatan di Provinsi Bali.

Pendampingan dalam acara ini melibatkan 65 pelaku usaha di bidang kosmetika, 45 pelaku usaha di bidang obat tradisional dan 20 pelaku usaha (start up) yang sedang dalam pendampingan Badan POM. Adapun, kegiatan dilaksanakan di Bali untuk menjangkau pelaku usaha termasuk produk-produk tematik lokal yang berada di wilayah Bali, Jawa Timur (Banyuwangi), Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, yang memiliki potensi yang sangat baik untuk obat tradisional dan kosmetika yang diharapkan dapat merebut peluang pasar di dalam negeri dan ekspansi pemasaran ke luar negeri.

DESEMBER

Sarasehan Jamu Nusantara



Badan POM menggelar Sarasehan Jamu Nusantara mengangkat tema “Jejak Empiris dengan Dukungan IPTEK Menuju Daya Saing Produk Herbal Nasional” secara *offline* dan *online* di Yogyakarta pada 2 Desember 2021. Kegiatan ini ditujukan untuk menggali informasi empiris/ potensi kearifan lokal dari efektivitas tanaman Obat herbal dari seluruh Nusantara, untuk dikembangkan dalam penelitian, dan menjadi rujukan untuk pendaftaran. Selain itu dapat menjadi media penghubung dalam menciptakan kesamaan persepsi antara pemangku kepentingan dalam pengembangan herbal nasional.

Sepanjang tahun 2021, Badan POM telah melaksanakan berbagai pemberdayaan dan pembinaan kepada pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Obat Tradisional, antara lain di Maluku, Palangkaraya, Kediri, Tangerang, Bogor, Medan dan Denpasar. Berbagai Jamu Nusantara produksi UMKM dari berbagai wilayah telah diterbitkan izin edarnya.



Melalui kegiatan ini, Badan POM berharap dapat meningkatkan kapasitas UMKM Obat Tradisional Indonesia untuk mengembangkan produk herbal nasional dengan basis kearifan local dan melestarikan Jamu Nusantara berbagai warisan budaya bangsa.



Dalam rangka memperkuat pengawasan post market melalui program pemberdayaan masyarakat KIE berbasis digital, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (PMPU OT SK Kos) mengadakan kegiatan Kampanye OT, SK dan Kosmetika Aman Melalui Lomba Tik Tok Nasional. Program ini menarget 4.297 masyarakat dan 1.578 lintas sektor mendapat KIE dan feed back 2.533 tik tok tentang keamanan dan manfaat OT, SK dan Kosmetika di masa pandemi. Lomba tik tok ini sudah disediakan hadiah yang banyak dan menarik.



Melalui program ini diharapkan terwujud masyarakat digital anti-hoax yang terlindung dari produk yang berbahaya bagi kesehatan.

Pada 2 Desember 2021 di Yogyakarta dilakukan pengumuman lomba kampanye nasional obat tradisional, suplemen Kesehatan dan kosmetik aman. Hadiah disampaikan pemenang oleh Kepala Badan POM dan Sekretaris Daerah Yogyakarta.



Duta Kosmetika/Jamu Aman yang dibentuk dalam program Badan POM goes to School dan Badan POM goes to Campus seperti Celeste dan Bintang diikutsertakan bersama Ibu Kepala Badan POM dalam pengambilan video KIE “Dukung Kosmetika Lokal

Bangga_Buatan Indonesia” di Yogyakarta bersamaan dengan acara Sarasehan Jamu Nusantara pada tanggal 2 Desember 2021.

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Institusi

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik merupakan unit yang resmi beroperasi sejak Februari 2021 berdasarkan Peraturan Badan POM nomor 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM.

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik ikut berkontribusi aktif dalam pencapaian tujuan organisasi dengan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut:

Visi

Dalam menghadapi dinamika lingkungan dengan segala bentuk perubahannya, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik mengacu pada visi Badan POM di mana segenap jajaran bercita-cita untuk mewujudkan suatu keadaan ideal bagi masyarakat Indonesia, yaitu :
”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Misi

1. Membangun SDM Unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan Pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai

luluh yang hidup dan tumbuh-kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya. Badan POM memiliki 6 (enam) budaya kerja yang disingkat dalam akronim PIKKIR, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi

2. Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan

3. Kredibilitas

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional

4. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

B. Struktur Organisasi dan Tupoksi

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara struktural di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dengan gambar sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat konsumen dan pelaku usaha obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat konsumen dan pelaku usaha obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan masyarakat konsumen dan pelaku usaha obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
4. pelaksanaan koordinasi dan advokasi dengan pemerintah daerah di bidang pengawasan obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan masyarakat konsumen dan pelaku usaha obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik;

6. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat konsumen dan pelaku usaha obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik; dan
7. pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional berdasar dengan pengelompokan uraian fungsi sebagai berikut berdasar Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.02.02.1.2.12.20.1149 tahun 2020 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan:

- a. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyisihan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang advokasi pemerintah daerah dan pemberdayaan komunitas sosial dan kemasyarakatan di bidang obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik serta tata operasional meliputi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan, dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan, dan administrasi penjaminan mutu direktorat;
- b. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan meliputi pendampingan pengembangan bahan obat tradisional dan pendampingan usaha mikro kecil dan menengah obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan; dan
- c. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan meliputi pendampingan pengembangan bahan alam kosmetik dan pendampingan usaha mikro kecil dan menengah kosmetik

Adapun pengelompokan uraian fungsi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik terdiri atas:

- a. Kelompok substansi peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat di bidang obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik, terdiri atas:
 1. Subkelompok substansi peningkatan peran pemerintah daerah;
 2. Subkelompok substansi pemberdayaan komunitas sosial dan kemasyarakatan;dan

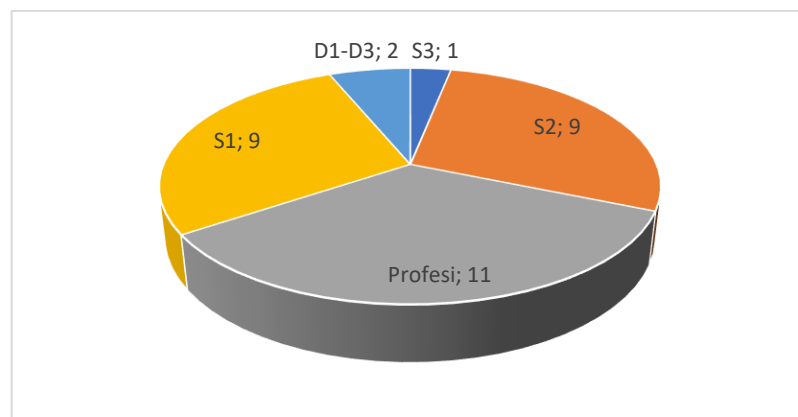
3. Subkelompok substansi tata operasional.
- b. Kelompok substansi pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan, terdiri atas:
 1. Subkelompok substansi pendampingan pengembangan bahan obat tradisional; dan
 2. Subkelompok substansi pendampingan usaha mikro kecil dan menengah obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan.
 - a. Kelompok substansi pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah kosmetik, terdiri atas:
 1. Subkelompok substansi pendampingan pengembangan bahan alam kosmetik; dan
 2. Subkelompok substansi pendampingan usaha mikro kecil dan menengah kosmetik.

BAB 2 PENGELOLAAN SUMBER DAYA

A. Sumber Daya Manusia

1. Data Kepegawaian (berdasarkan tingkat pendidikan, jabatan, dan usia)

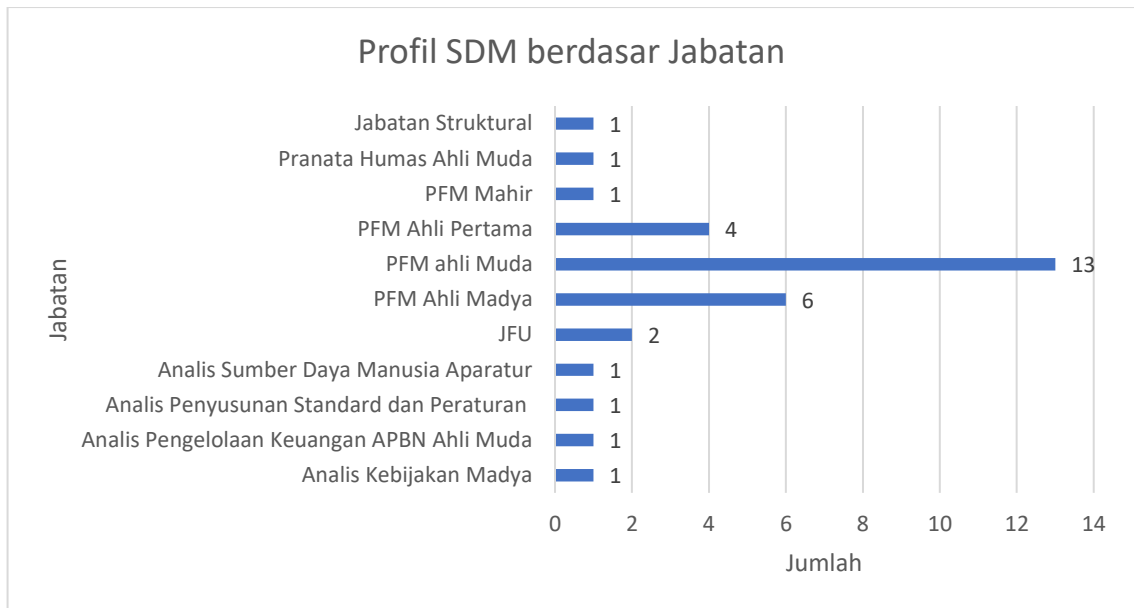
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian dan kompetensi yang sesuai. Jumlah SDM yang dimiliki Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Pada tahun 2021 jumlah total pegawai ASN di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik adalah 32 pegawai. Berikut komposisi ASN berdasarkan tingkat Pendidikan.



Grafik 1. Komposisi ASN berdasarkan tingkat pendidikan

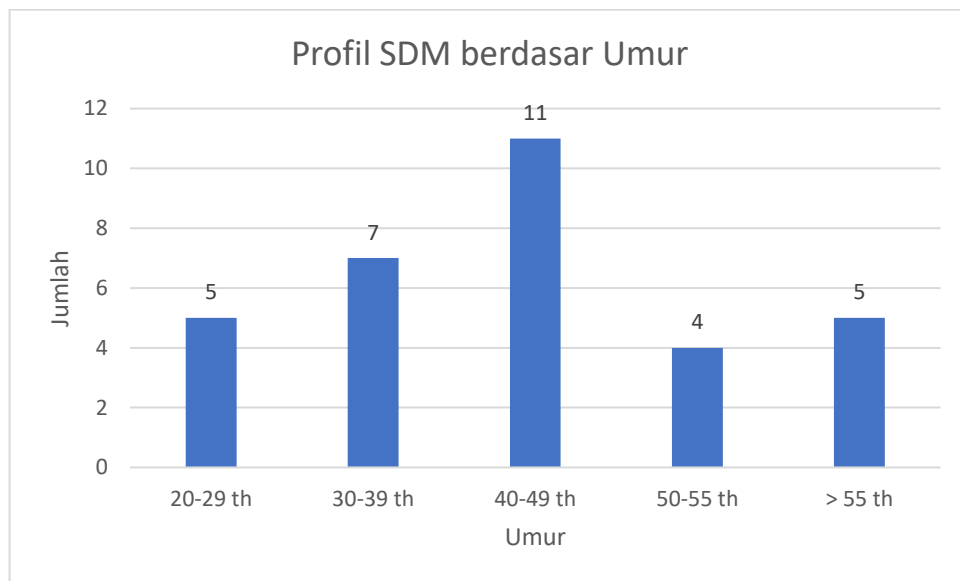
Dalam rangka meningkatkan kompetensi, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik memberikan kesempatan kepada SDM nya untuk mengikuti Tugas Belajar. Tahun 2021, 1 (satu) orang telah menyelesaikan tugas belajar setingkat S2 dan 1 (satu) orang masih menjalani tugas belajar setingkat S1.

Pada tahun 2021, jumlah terbesar pegawai dengan jabatan fungsional tertentu di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik adalah PFM Muda yaitu sebanyak 13 orang, dan 6 orang menduduki jabatan PFM Madya. Profil SDM berdasarkan jabatan sebagaimana tercantum dalam gambar di bawah ini.



Grafik 2. Profil SDM berdasarkan Jabatan Total 32 Pegawai

Sedangkan untuk profil SDM berdasarkan umur adalah sebagai berikut:



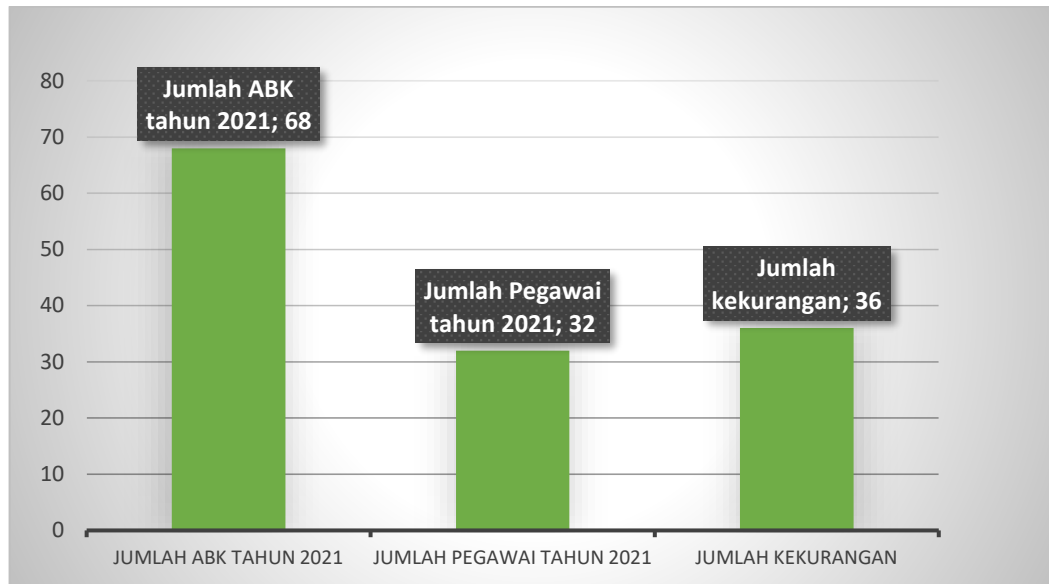
Grafik 3. Profil SDM berdasarkan Umur

Dari grafik tersebut terlihat bahwa generasi milenial (30-49 tahun) mendominasi sejumlah 18 orang, serta yang akan memasuki pensiun sekitar 5 tahun lagi (PFM Madya) ada 5 orang.

2. Kebutuhan Pegawai

Saat ini perubahan lingkungan strategis sangat dinamis karena itu diperlukan SDM yang mampu beradaptasi ditopang dengan kompetensi yang sesuai dengan bidang

tugasnya sehingga mampu berkinerja baik. Peningkatan kompetensi SDM secara berkesinambungan melalui *capacity building* yang terencana menjadi prioritas. Berdasarkan Analisis Beban Kerja Tahun 2021, jumlah ideal pegawai sebanyak 68 orang, kondisi saat ini masih kekurangan SDM sejumlah 36 orang. Berikut ini adalah profil kebutuhan pegawai berdasarkan analisis beban kerja.



Grafik 4. Kebutuhan SDM Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2021 berdasarkan Analisis Beban Kerja

3. Peningkatan Kompetensi SDM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pasal 70 bahwa setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) pasal 203 bahwa pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun, maka setiap Lembaga Pemerintah wajib melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi bagi pegawainya. Sehingga setiap pegawai dilakukan peningkatan kompetensi minimal 20 JP dan dipantau di aplikasi SIASN. Hasil pemantauan peningkatan kompetensi minimal 20 JP pegawai tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.

B. Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung terlaksananya seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha obat tradisional, suplemen Kesehatan dan kosmetik selain diperlukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, perlu juga didukung dengan

adanya sarana dan prasarana penunjang. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik merupakan Direktorat baru yang dibentuk tahun 2021, sehingga pada awal pembentukan masih minim untuk sarana prasarana. Belum ada ruangan di Badan POM, sehingga disewakan ruangan di Graha Mir Jalan Pemuda dengan sarana dan prasarana minim. Lalu di bulan Oktober 2021, pindah mendapat ruangan di Badan POM yaitu di Gedung C lantai 3. Untuk penunjang fasilitas kantor berupa komputer, laptop dan alat pengolah data lainnya juga baru ada di bulan Agustus 2021 karena adanya kendala dalam pemesanan secara e-katalog, sehingga di awal-awal tahun 2021 masih menggunakan fasilitas pribadi. Daftar inventaris kantor yang dilaksanakan pada tahun 2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran 4.

C. Anggaran

Pada tahun 2021, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik memperoleh anggaran sebesar Rp7.654.120.000. Realisasi anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2021 adalah sebesar Rp.7.653.987.368 atau sebesar 100% dari total pagu anggaran, dengan rincian seperti tertera pada Lampiran 1 dan Lampiran 2.

BAB 3 HASIL KEGIATAN

Sasaran Kegiatan 1	Pelayanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha yang prima
Indikator Kinerja Utama 1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos

Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah:

Tanaman Obat Indonesia Berbasis Kearifan Lokal (umkm ot)

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Napak Tilas Jejak Empiris. Kegiatan berupa pembuatan video eksplorasi, pengambilan video dilakukan di Bali (Secret garden, Kebun Tanaman Obat Pak Oles di Simangaraja dan Pemasaran Pak Oles di Denpasar) dan di Jakarta (Zeta Nirmala dan DLBS). Hasil video tersebut dapat dilihat pada tautan berikut https://bit.ly/VideoJamuNusantara_BPOM2021.

Sasaran Kegiatan 2	Meningkatnya kesadaran pemerintah daerah dan masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu OT, SK dan Kos
Indikator Kinerja Utama 1	Persentase Pemda yang menerapkan program keamanan OT, SK dan Kos

Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah:

1. Strategi Komunikasi Berbasis Digital dalam rangka Meningkatkan KIE Keamanan dan Kemanfaatan OT, Obat Kuasi, SK dan Kosmetik

Kegiatan ini merupakan upaya Badan POM untuk memperkuat pengawasan post market dengan meningkatkan peran lintas sektor terutama Pemerintah Daerah dalam melakukan pendampingan UMKM Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan pemberdayaan masyarakat. Sinergisitas bersama Pemerintah Daerah berupa advokasi terhadap kemudahan perizinan, akses permodalan dan pasar bagi UMKM. Output berupa rencana aksi program Sinergitas Badan POM Bersama Lintas Sektor Dalam Rangka Pendampingan UMKM dan dukungan Obat Bahan Alam dalam bentuk Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) dan Laporan Hasil Kegiatan

2. Advokasi dan Koordinasi Lintas Sektor

Kegiatan ini merupakan program sinergisitas bersama Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilih Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika yang aman. Pemilihan daerah yang diintervensi mempertimbangkan beberapa hal yaitu: Peredaran OT dan Kosmetik yang berisiko

tinggi (berdasarkan hasil pengawasan), Indeks Kesadaran Masyarakat tentang obat dan makanan serta tingkat partisipasi Pemda. Output berupa rencana aksi Sinergisitas Bersama Lintas Sektor Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat dalam bentuk Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) dan Laporan Hasil Kegiatan

Sasaran Kegiatan 2	Meningkatnya kesadaran pemerintah daerah dan masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu OT, SK dan Kos
Indikator Kinerja Utama 2	Persentase duta yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat

Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah:

Pemilihan Duta Kosmetik /Jamu Aman dalam Badan POM Goes To School/Campus

Kegiatan ini program pemberdayaan Duta Kosmetika Aman dan Duta Jamu Aman yang berasal dari pelajar dan mahasiswa dan dibentuk di tiap UPT BPOM seluruh Indonesia. Tiap UPT akan membentuk 3 Duta terbaik sehingga akan ada 219 Duta Jamu/Kosmetik Aman se-Indonesia. Duta yang terpilih akan berpartisipasi aktif melakukan KIE Obat Tradisional dan Kosmetik Aman kepada komunitasnya. Pelaksanaan kegiatan pemilihan Duta Kosmetika/Jamu Aman dalam Program Badan POM *Goes to School/Campus* tahun 2022 terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

- a. *Training of Trainer* (ToT) sebagai pembekalan materi teknis bagi petugas UPT BPOM agar bisa menjadi Fasilitator program Badan POM *goes to school/campus*.
- b. Pembentukan Duta Kosmetika/Jamu Aman di tingkat UPT BPOM
- c. *Advanced Training Duta* (ATD) merupakan program pelatihan lanjutan bagi 219 Duta Kosmetika/Jamu Aman
- d. Monitoring dan Evaluasi merupakan pendampingan kinerja duta oleh BPOM pusat dalam duta menjalankan komitmennya untuk melakukan KIE.
- e. Penetapan Duta Kosmetika Aman dan Duta Jamu Aman Terbaik Nasional. Hasil visitasi akan ditetapkan peringkat 1,2 dan 3 duta terbaik nasional.

Output kegiatan ini dihitung dari persentase Duta yang berpartisipasi aktif melakukan program pemberdayaan masyarakat terhadap total Duta (219) yang sudah mendapatkan bimbingan teknis.

Sasaran Kegiatan 3	Meningkatnya koordinasi dengan pemda dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, pendampingan UMKM dan penerapan keamanan OT, SK, dan Kos
Indikator Kinerja Utama 1	Persentase pemda yang diintervensi dalam rangka pendampingan UMKM dan penerapan keamanan OT, Kos dan SK

Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah:

1. Advokasi Lintas Sektor

Kegiatan ini merupakan upaya Badan POM untuk memperkuat pengawasan post market dengan meningkatkan peran lintas sektor terutama Pemerintah Daerah dalam melakukan pendampingan UMKM Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan pemberdayaan masyarakat. Sinergisitas bersama Pemerintah Daerah berupa advokasi terhadap kemudahan perizinan, akses permodalan dan pasar bagi UMKM. Persentase pemda yang diintervensi dalam rangka pendampingan UMKM dan penerapan keamanan OT, Kos dan SK adalah jumlah Pemda yang berkomitmen untuk melakukan pendampingan UMKM dan penerapan keamanan OT, Kos dan SK dibagi dengan jumlah Pemda yang diintervensi dikali 100%. Penentuan daerah berdasarkan hasil pengawasan, indeks kesadaran masyarakat, atau laporan dari UPT BPOM atau Direktorat lain tentang kendala pendampingan UMKM OT dan UMKM Kosmetik

2. Koordinasi Pemberdayaan OT, SK dan Kos serta Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor

Koordinasi perlu dilakukan oleh Dit PMPU OT SK Kos serta perlu Kerjasama lintas sektor. Kegiatan ini mengakomodir kegiatan yang perlu biaya mandiri dari lintas sektor yang mengundang Dit PMPU OT SK Kos.

Sasaran Kegiatan 3	Meningkatnya koordinasi dengan pemda dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, pendampingan UMKM dan penerapan keamanan OT, SK, dan Kos
Indikator Kinerja Utama 2	Persentase pemda yang diintervensi dalam pemberdayaan masyarakat di bidang keamanan OT, SK, dan Kos

Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah:

1. Integrasi Lintas Sektor Dalam Rangka Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kosmetik

- a. Kegiatan Pendampingan Kosmetik Tematik dalam rangka Integrasi Lintas Sektor dalam rangka Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kosmetik di selenggarakan dua kali yaitu di Provinsi Bali pada tanggal 9-10 Februari 2021 dan di Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 24-25 Maret 2021. Kegiatan tersebut

dilaksanakan selama 2 hari dengan kegiatan hari pertama yaitu penyelenggaraan kegiatan FGD (*Forum Group Discussion*) bersama lintas sektor terkait dan juga pelaku usaha UMKM kosmetik yang belum mempunyai sertifikat CPKB maupun dalam proses pengurusan perizinan terkait kosmetik dan kegiatan hari kedua Desk Pendampingan UMKM kosmetik. Dalam kegiatan FGD tersebut dihadiri oleh Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Kegiatan ini bertujuan agar pemerintah dan seluruh pihak terkait mengetahui secara teknis kendala dan permasalahan yang dihadapi UMKM kosmetik dalam pengembangan produknya serta dapat merumuskan strategi yang implementatif secara sistematis, sinergis dan holistik dalam mengatasi kendala yang dihadapi UMKM dan mendukung percepatan pengembangan produk kosmetik, sehingga produk kosmetik yang dihasilkan aman dan bermutu serta berdaya saing.



Gambar 2. Kegiatan Pendampingan Kosmetik Tematik

- b. Rapat Koordinasi Bersama Linsek Terkait Pemberdayaan UMKM Kosmetik BPOM
 - i. Waktu Pelaksanaan: Rabu, 2 Juni 2021
 - ii. Tempat Pelaksanaan: Hybrid – Bogor
 - iii. Kegiatan di hadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga yaitu: Kementerian Koperasi dan UMKM; Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi; Inkubator bisnis IPB; Perwakilan Loka POM Bogor
 - iv. Hasil Pembahasan Pertemuan:
 1. Pendampingan oleh BPOM kepada tenan adalah terkait izin sarana dan izin edar produk OT dan Kosmetik
 2. Sinergisme bersama BPOM dilakukan melalui inkubator

3. Pendampingan oleh BPOM diharapkan dilakukan di awal agar memahami pengetahuan terkait perizinan OT dan Kosmetik

v. Dokumentasi Kegiatan:



Gambar 3. Koordinasi Bersama Linsek Terkait Pemberdayaan UMKM Kosmetik BPOM

c. Kegiatan Pembahasan Konsep Dan Peran Pemangku Kepentingan Dalam Sentra Informasi Entrepreneur Kosmetik

- i. Waktu Pelaksanaan: Kamis, 10 Juni 2021
- ii. Tempat Pelaksanaan: Hybrid – Bogor
- iii. Kegiatan di hadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga yaitu: Kementerian Perekonomian; Kementerian Koperasi dan UMKM; Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM); Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (PERKOSMI); Asosiasi Pengusaha Kesehatan & Kecantikan Indonesia (AP2KI); Inkubator bisnis IPB
- iv. Hasil Pembahasan Pertemuan: K/L dan asosiasi mendukung pembentukan rumah sentra informasi entrepreneur kosmetik dengan melakukan kolaborasi berdasarkan peran masing-masing K/L
- v. Dokumentasi Kegiatan:



Gambar 4. Pembahasan Konsep Dan Peran Pemangku Kepentingan Dalam Sentra Informasi Entrepreneur Kosmetik

d. Kegiatan Pembahasan Rencana Pendampingan Terkait Perizinan Kosmetik Kepada Pra Start Up dan Start Up Binaan LKST IPB

- i. Waktu Pelaksanaan: Jumat, 18 Juni 2021
- ii. Tempat Pelaksanaan: IPB Bogor

- iii. Kegiatan dihadiri: Wakil Kepala Bidang Inovasi dan Ahli Teknologi LKST IPB, Dr. Ir. Tri Partono, M.Sc.; Wakil Bidang Manajemen Inovasi dan Komersialisai LKST Bogor, Dr. Roza Yusfiandayani, S.Pi.; Asisten Bidang Inkubator Bisnis LKST IPB, Deva Primadia Almada, S.Pi, M.Si.; Asisten bidang Kemitraan Industri LKST IPB, Muhammad Hendra Wibowo, S.T.Pi, MM.
- iv. Hasil Pembahasan:
 1. Sharing informasi/ data terkait tenant/ *startup* maupun *pra startup* binaan LKST IPB.
 2. Penyampaian Program terkait *pra startup*, yang merupakan pengembangan inovasi-inovasi karya IPB.
 3. Inovator di IPB mengembangkan produk atau inovasi yang akan mematuhi peraturan yang berlaku jika produk tersebut akan dikomersialisasikan.
 4. Pihak LKST IPB mengharapkan adanya pendampingan kepada para tenant IPB dan juga *pra startup*.
- v. Disepakati:
 1. Kelompok yang sudah memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB) namun belum memiliki izin operasional kosmetik dari Badan POM adalah kelompok *startup*
 2. Kelompok yang belum memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB) serta belum memiliki izin operasional kosmetik dari Badan POM adalah kelompok *pra startup*.
- vi. Dokumentasi Kegiatan:



Gambar 5. Pembahasan Rencana Pendampingan Terkait Perizinan Kosmetik Kepada Pra Start Up dan Start Up Binaan LKST IPB

2. Forum Komunikasi Lintas Sektor Pemangku Perizinan Daerah dalam rangka Pengembangan UMKM di Bidang Obat Tradisional
 Sesuai arahan Presiden Joko Widodo bahwa Presiden menuntut komitmen jajarannya terhadap dukungan bagi para pelaku UMKM dan produk-produk lokal dan sejalan dengan misi ke 2 Badan POM dalam memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur

ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa, diperlukan kerjasama yang intensif antar Kementerian/ Lembaga terkait dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bidang Obat Tradisional.

Saat ini, anggaran dan program untuk pemberdayaan UMKM dirasakan kurang maksimal karena tersebar di kurang lebih 18 kementerian dan lembaga. Akibatnya, sasaran program menjadi tidak fokus dan sulit menyasar para pelaku UMKM dengan baik, karena itu Bapak Presiden menegaskan kembali pentingnya *one gate policy*. Program pengembangan UMKM jangan sampai berjalan sendiri-sendiri sehingga pemberdayaan UMKM betul-betul terintegrasi, terpadu, baik dalam menentukan sektor prioritas, langkah-langkah strategis, maupun desain pembiayaan.

Sampai saat ini, terdapat permasalahan yang dihadapi oleh UMKM Obat Tradisional, yaitu:

- a. Perizinan Produksi: Masih banyaknya UKOT/UMOT yang Terkendala mengurus izin produksinya
- b. Kemampuan UMKM OT:
 1. Rendahnya pemahaman terhadap regulasi
 2. Sulitnya mendapatkan tenaga kefarmasian
 3. Kendala permodalan
 4. Rendahnya kemampuan UMKM Obat Tradisional dalam penyiapan sarana produksi sesuai dengan CPOTB
- c. Kurangnya SDM Pengawasan: Keterbatasan petugas dan kemampuan UPT BPOM dalam melakukan pengawasan ke seluruh sarana.
- d. Program Pembinaan Belum Terpadu
 1. Program pembinaan masih sedikit
 2. Pembinaan UMKM OT masih bersifat sektoral sehingga kurang efektif
 3. Peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah belum terharmonisasi
 4. Belum sinkronnya arah kebijakan pengembangan UMKM OT antar lintas sektor

Untuk menjawab permasalahan di atas, perlu dibangun jejaring kerja sama dengan Kementerian/ Lembaga dan Lintas Sektor terkait, khususnya di daerah yang masih minim informasi melalui Forum Komunikasi Lintas Sektor Pemangku Perizinan Daerah dalam rangka Pengembangan UMKM di Bidang Obat Tradisional.

- a. Kemenko PMK: Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga terkait dengan pembinaan UMKM Obat Tradisional
- b. Kemenko Perekonomian (Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM):

1. Memiliki program prioritas pengembangan industri berbasis tanaman obat termasuk UMKM dengan memberikan bantuan baik dari kebijakan, pemberdayaan ekonomi, fasilitas maupun peralatan
2. Mendukung pembangunan Sentra Koperasi Jamu
- c. Kementerian Koperasi dan UKM: Memiliki peran sebagai pelaksana pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah
- d. Kementerian Kesehatan: Berperan dalam pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang produksi dan distribusi sediaan farmasi termasuk obat tradisional
- e. Pemda Setempat:
 1. Dinas setempat selaku pihak yang mengeluarkan izin usaha dan memiliki data terkait UMKM Obat Tradisional di daerah masing-masing
 2. Diharapkan dapat menyediakan lahan pembangunan Sentra Koperasi jamu
- f. GP Jamu: Organisasi pengusaha jamu yang dapat melakukan pembinaan serta menjadi perwakilan bagi pelaku usaha jamu dalam menyuarakan kebutuhan anggotanya
- g. IAI & PAFI: Organisasi profesi tempat berhimpun Apoteker, tenaga teknis kefarmasian (TTK) yang dapat terlibat dalam program pendampingan UMKM Obat Tradisional khususnya untuk UMKM dengan penanggung jawab TTK

Sasaran Kegiatan 4	Meningkatnya Kapasitas UPT BPOM dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha OT, SK dan Kos
Indikator Kinerja Utama 1	Persentase UMKM OT yang memenuhi standar

Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah:

1. Pemberdayaan Orang Tua Angkat Dalam Rangka Peningkatan UMKM Obat Tradisional Berdaya Saing
 Obat Tradisional merupakan budaya dan jati diri bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dilestarikan. Obat Tradisional yang lebih dikenal dengan istilah Jamu memiliki dimensi manfaat yang luas meliputi aspek perekonomian, sosial budaya & kesehatan. Sehingga perlu dilakukan upaya-upaya yang komprehensif dalam mewujudkan Obat Tradisional berdaya saing.

Berdasarkan data Badan POM saat ini, terdapat 128 Industri Obat Tradisional dan 941 UMKM Obat Tradisional. Dari data tersebut terlihat bahwa produsen obat tradisional masih didominasi oleh UMKM Obat Tradisional. Namun masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh UMKM Obat Tradisional antara lain:

- Pemenuhan aspek Cara produksi Obat Tradisional yang Baik masih relatif rendah
- Pemenuhan persyaratan mutu produk obat tradisional untuk beberapa parameter uji seperti persyaratan cemaran mikroba masih relatif rendah
- Kendala dalam kegiatan usahanya, seperti aspek manajemen keuangan, SDM/tenaga kerja, administrasi, modal, penyediaan bahan baku, promosi produk, dan perluasan area pemasaran
- Kendala dalam mengurus perizinan.

Salah satu misi Badan POM adalah memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa. Berbagai program dan kebijakan seperti penerapan CPOTB bertahap telah dilakukan untuk mempermudah UMKM Obat Tradisional. Untuk mewujudkan BPOM bersinergi dengan pihak Business/Swasta dengan melakukan program Orang Tua Angkat UMKM Obat Tradisional.

Saat ini sudah ada 10 industri Obat tradisional yang berkomitmen menjadi Orang Tua Angkat (PT Konimex, PT Jamu dan Farmasi Sido Muncul, PT Industri Jamu Borobudur, PT Martina Berto Tbk., PT Mustika Ratu Tbk., dan PT Sinda Budi Sentosa, PT Air Mancur, PT Kino Indonesia, PT Sari Enesis, PT Ultrasakti). Dukungan Orang tua angkat dapat berupa bantuan infrastruktur (teknologi, peralatan, mesin, dll), Peningkatan kapasitas produksi dan permodalan, Peningkatan kompetensi SDM, Pemasaran produk, Sharing Knowledge dll. Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan revitalisasi dan tindak lanjut program yang menghasilkan dampak nyata bagi UMKM Obat Tradisional.

Tujuan kegiatan ini adalah mempercepat kemajuan UMKM Jamu sehingga produk memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku dan produk dapat bersaing secara lokal maupun global dengan adanya bantuan/dukungan dari Orang Tua Angkat.

Pada triwulan ke empat tahun 2021, telah dilakukan *sharing knowledge* antara orang tua angkat dan anak angkat UMKM OT yang difasilitasi BPOM. *Sharing knowledge* dibagi menjadi beberapa sesi sebagai berikut:

Tabel 1. Sesi *sharing knowledge*

No	Sharing Knowledge	Narasumber	Jumlah peserta
1	Tips & Trick Bertahan di Industri OT serta Kiat Menembus Pasar Ekspor	<ul style="list-style-type: none"> • PT Borobudur • PT Sido Muncul • PT Mustika Ratu 	204
2	Implementasi Aspek Higiene dan Sanitasi serta Dokumentasi di usaha obat tradisional	<ul style="list-style-type: none"> • PT Air Mancur • PT Sinde Budi Sentosa 	88
3	Penyiapan dokumen Izin Edar Produk Obat Tradisional dan Tata Cara Sertifikasi CPOTB Bertahap	PT Ultra Sakti	39
4	Bantuan Permodalan bagi UMKM dan Penggunaan Fasilitas ekstraktor dan freeze dry	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perekonomian, • Kementerian Koperasi dan UKM • Inkubator Bisnis IPB 	69
5	Teknologi Produksi Produk Dan Ekstrak Obat Tradisional serta Pembuatan Laboratorium Sederhana	<ul style="list-style-type: none"> • PT. Industri Jamu Borobudur • PT Air Mancur 	65
6	Branding dan Packaging Design serta Pemasaran Online	<ul style="list-style-type: none"> • PT Ultra Sakti • PT Sari Enesis Indah 	61
7	Strategi Memilih Bahan Baku Obat Tradisional Berbentuk Ekstrak serta Tanaman Obat Kosmetika dan Aromatik: budidaya, pengolahan, produksi dan pasca panen	<ul style="list-style-type: none"> • Sido Muncul Group • PT Martina Berto, Tbk. 	48
8	Implementasi Aspek Produksi dan Penyimpanan di usaha obat tradisional	PT Air Mancur	47
9	Implementasi Aspek Sistem Manajemen Mutu Pengawasan Mutu di UMKM OT	PT Konimex	49

Orang tua angkat juga memberikan bantuan kepada pelaku usaha jamu gendong berupa alat peras dan alat Rajang. Penyerahan secara simbolis dilakukan pada Sarasehan Jamu Nusantara di Yogyakarta 2 Desember 2021.



Gambar 6. FGD Program Orang Tua Angkat Jamu



Gambar 7. Sharing Knowledge Program Orang Tua Angkat Jamu

2. Optimalisasi Pelaksanaan Pendampingan UMKM OT

Badan POM selaku institusi pengawasan Obat dan Makanan, mempunyai salah satu misi yaitu memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa. Berdasarkan hasil pengawasan Badan POM diketahui beberapa hal yang menjadi kendala pengembangan UMKM Obat Tradisional yaitu:

- Kurangnya pemahaman pelaku usaha terkait tata cara registrasi obat tradisional terutama selama masa pandemi ini Badan POM telah memberikan beberapa relaksasi dalam proses registrasi obat tradisional untuk meningkatkan daya tahan tubuh,
- Kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam menerapkan aspek CPOTB bertahap
- Kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang tata cara pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui proses *One Single Submission* (OSS)

Dalam rangka menuntaskan permasalahan tersebut serta melaksanakan misi BPOM maka Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional dan

Suplemen Kesehatan mengadakan kegiatan Optimalisasi Pelaksanaan Pendampingan UMKM OT. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut dapat memberikan pengetahuan terkait persyaratan CPOTB, registrasi obat tradisional dan ketentuan lain yang berlaku. Selain itu, kegiatan ini juga bisa menjadi ajang konsultasi dan penyelesaian masalah/ kendala yang dihadapi pelaku usaha. Selain itu, dalam kegiatan ini, pelaku usaha dapat langsung didampingi implementasi CPOTB Bertahap secara on site di fasilitas produksinya.

Tujuan dilakukan kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran UMKM obat tradisional akan pentingnya aspek sanitasi hygiene dalam pembuatan obat tradisional; meningkatkan jumlah UMKM obat tradisional yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap; Meningkatkan daya saing produk obat tradisional di pasar lokal dan global; dan melindungi konsumen dari produk obat tradisional yang tidak memenuhi syarat untuk dikonsumsi.

Target yang ditetapkan untuk pelaku UMKM yang didampingi adalah 90 UMKM. Namun sehubungan dengan masa pandemi COVID-19, menyebabkan dilakukannya refocusing anggaran sehingga target yang memenuhi standar diturunkan. Semula target UMKM yang memenuhi standar adalah 72 UMKM menjadi 50 UMKM. Sampai dengan triwulan empat ini jumlah UMKM yang didampingi adalah 158 dengan rincian Ambon (20), Banyumas (11) dan Palangkaraya (13), Makassar (25) Kediri (21), Tangerang (17), Bogor (20). Sedangkan UMKM OT yang telah memenuhi standar sampai dengan akhir Desember 2021 adalah 51.



Gambar 8. Advokasi Lintas Sektor dan Bimbingan Teknis dalam Rangka Pembinaan UMKM di Bidang Obat Tradisional di Provinsi Maluku
18 – 19 Februari 2021



Gambar 9. Advokasi Lintas Sektor dan Bimbingan Teknis dalam Rangka Pembinaan UMKM di Bidang Obat Tradisional di Palangkaraya 17-18 Maret 2021



Gambar 10. Optimalisasi Pendampingan UMKM OT di Kediri 8-10 Juni 2021

3. Pendampingan Dalam Rangka Pemberdayaan UMKM serta Usaha Jamu Gendong Untuk Menjamin Keamanan Produk dengan memenuhi Sanitasi Higiene dan Dokumentasi Jamu merupakan salah satu warisan budaya bangsa yang perlu dilestarikan, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kesehatan dan kesejahteraan seluruh rakyat serta duta kebanggaan bangsa. Indonesia memiliki jamu dengan keragaman hayati, budaya dan kearifan lokal masyarakat setempat. Jamu merupakan warisan turun-temurun yang bersumber pada kekayaan alam. Bukti empiris menunjukkan bahwa Jamu dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat, utamanya dalam upaya promotif dan preventif. Sejak dahulu jamu telah digunakan secara luas untuk memelihara kesehatan dan pengobatan secara tradisional hingga saat ini.

Untuk menjamin produk yang diolah oleh UMKM Jamu termasuk Usaha Jamu Gendong sesuai dengan protokol COVID-19, maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis dalam pembinaan UMKM Jamu termasuk Usaha Jamu Gendong melalui koordinasi lintas sektor dan stakeholder terkait untuk mendukung pengembangan UMKM Jamu dan Usaha Jamu Gendong yang aman, bermutu dan bermanfaat dan memiliki daya saing.

Dalam rangka memperluas pembinaan yang dilakukan untuk Usaha Jamu Gendong, akan dilakukan pendampingan dan pembinaan yang bekerjasama dengan yayasan empu dan benih baik.

Tujuan dilakukan kegiatan ini antara lain Meningkatkan kemampuan UMKM jamu dan usaha jamu gendong dalam hal aspek hygiene, sanitasi dan dokumentasi produk terhadap keamanan dan mutu produk ; Menjadikan jamu semakin dikenal oleh masyarakat melalui promosi jamu yang aman, bermutu dan bermanfaat ; Meningkatkan kesadaran UMKM Jamu dan usaha jamu gendong akan pentingnya aspek sanitasi higiene dalam pembuatan jamu; Melindungi konsumen dari produk jamu yang tidak memenuhi syarat untuk dikonsumsi ;Memperluas wawasan dan meningkatkan daya saing pelaku usaha jamu dengan pemasaran melalui media online

Kegiatan pendampingan jamu gendong meliputi:

a. Pembuatan Modul dan Buku Saku Cara Pembuatan Jamu Gendong Yang Baik

Pembuatan modul dan buku saku Cara Pembuatan Jamu Gendong yang Baik melibatkan stake holder terkait antara lain, kementerian pertanian, Kampung Jamu Organik, Jamu Digital, Café Acharaki. Modul Jamu gendong ditujukan kepada fasilitator UMKM OT sedangkan Buku Saku Jamu Gendong ditujukan kepada pelaku usaha jamu gendong.

b. Bimbingan Teknis Jamu Gendong

Bimbingan teknis kepada pelaku usaha jamu gendong diselenggarakan secara hybrid di hotel PO Semarang pada Kamis, 14 Oktober 2021. Kegiatan ini diikuti oleh 145 (seratus empat puluh lima) orang Ibu jamu gendong dari komunitas EMPU yang ada di Semarang, Ambon, Jakarta, Pulau Seram, Sragen, Madura, Yogyakarta dan Palu. Bimbingan teknis diberikan kepada pelaku usaha jamu gendong, yang masih melakukan proses pembuatan dan pemasaran jamu gendong secara konvensional. Dengan bimtek ini diharapkan memberikan ilmu baru agar pelaku usaha jamu gendong dapat memproduksi dan memasarkan jamu dengan lebih kekinian. Oleh karena itu, pada bimtek ini diberikan topik terkait:

- Peran pemberdayaan perempuan dalam usaha jamu gendong
- Jamu gendong, budaya dan kesehatan
- Pengawasan produk obat tradisional di Jawa Tengah
- Pemilihan dan pengolahan bahan baku jamu
- Higiene, sanitasi dan dokumentasi jamu gendong
- Pemasaran digital jamu gendong
- Inovasi minuman jamu modern

c. *Desk consultation* terkait *higiene, sanitasi* dan dokumentasi jamu gendong

Direktorat PMPU OTSKK memberikan *desk consultation* terkait *higiene, sanitasi* dan dokumentasi jamu gendong. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha jamu gendong adalah:

- Area produksi yang menyatu dengan dapur, sehingga disarankan agar waktu produksi dibedakan dengan waktu pengolahan makanan.
- Peralatan yang digunakan dalam produksi jamu terbuat dari bahan aluminium dan plastik disarankan agar, menggunakan bahan dari stainlessstall dan plastik yang berkualitas food grade.



Gambar 11. Pendampingan Jamu Gendong

Sasaran Kegiatan 4	Meningkatnya Kapasitas UPT BPOM dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha OT, SK dan Kos
Indikator Kinerja Utama 2	Persentase UMKM Kos yang memenuhi standar

Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah:

1. Forum Kerja Pengembangan Hilirisasi dan Expo Kosmetik Tematik Nasional
 - a. Pertemuan Bersama Fakultas Perikanan dan Kelautan IPB terkait Hilirisasi Produk Kosmetik (Pertemuan I)
 - i. Waktu Pelaksanaan: Rabu/ 17 Maret 2021
 - ii. Tempat: Fakultas Perikanan dan Kelautan IPB
 - iii. Rapat dihadiri oleh : Dekan Fak. Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB; Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Kerja Sama dan Pengembangan Fak. Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB (Ibu Nurimala); Koordinator di bidang Bidang Hilirisasi dan Komersialisasi Fak. Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB (Prof. Nurjanah); Ka Loka POM Bogor
 - iv. Hasil Pertemuan I: Tujuan pertemuan adalah untuk menjembatani *researcher to customer*. Pada fakultas ini terdapat 5 (lima) Departemen yaitu : Departemen Teknologi Hasil Perairan (THP), Dep. Penangkapan Hasil Perikanan, Dep. Budidaya, Dep. Manajemen Sumber Daya Perairan, Dep. Ilmu dan Teknologi Kelautan. Kelima departemen ini selalu berupaya untuk menghasilkan banyak

inovasi. Jurusan/Dep. THP Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB merupakan jurusan yang terinovatif di IPB. Permasalahan yang dihadapi adalah hasil inovasi tidak selalu disambut dengan sistem industrialisasi, sehingga inovasi tidak berkembang. Regulasi di Indonesia, perguruan tinggi tidak boleh mendirikan industri sendiri. Disiasati dengan membuat "*teaching industry*". *Added value* bahan alam perairan di Indonesia tidak ada, misalnya rumput laut, hasil alam berlimpah tetapi tidak diberdayakan, sehingga kita malah impor bahan-bahan yang berasal dari rumput laut, misal glucosamin, dll. Harapan dekan, BPOM bisa merangkul dalam pengembangan inovasi sehingga dapat mengangkat nilai produk bangsa sendiri. Kondisi saat ini terkait perizinan yaitu beberapa UMKM binaan belum memiliki NIB dan secara paralel akan melakukan konsultasi *lay out* Denah Bangunan Industri ke Loka POM Bogor.

v. Kesimpulan Pertemuan I:

1. Perlu dibuat MoU/ Perjanjian Kerja Sama dengan BPOM terkait pengembangan dan pendampingan UMKM binaan Fak. Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB.
2. BPOM mengharapkan UMKM binaan telah memperoleh NIE produk inovasi tersebut pada tahun ini (rencana ada 3 produk), terkait akan adanya kegiatan expo hilirisasi pada bulan November 2021 mendatang.
3. Fak. Perikanan IPB mengharapkan adanya pendampingan dari BPOM, sehingga jika berhasil maka IPB dapat menjadi percontohan (*success story*) yang dapat dicontoh oleh universitas lain dan menjadi lahan sebagai *start up* bagi universitas lain yang ingin melakukan hal serupa.

b. Pertemuan Bersama Fakultas Perikanan dan Kelautan IPB terkait Hilirisasi Produk Kosmetik (Pertemuan II)

- i. Waktu Pelaksanaan: Rabu, 19 Mei 2021
- ii. Tempat: Fakultas Perikanan dan Kelautan IPB
- iii. Rapat dihadiri oleh : Dekan Fak. Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB; Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Kerja Sama dan Pengembangan Fak. Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB (Ibu Nurimala); Koordinator di bidang Bidang Hilirisasi dan Komersialisasi Fak. Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB (Prof. Nurjanah)
- iv. Hasil Pertemuan II: Tujuan pertemuan adalah membahas tentang PKS IPB dengan BPOM dan Perkenalan Program BPOM Goes to Campus/School. Materi dari BPOM (perizinan, program BPOM) diusulkan untuk dimasukkan dalam kurikulum kuliah. Akan diusulkan agar mahasiswa IPB bisa melakukan KKN dan magang di BPOM. IPB akan mengajukan permohonan tsb melalui PPSDM.

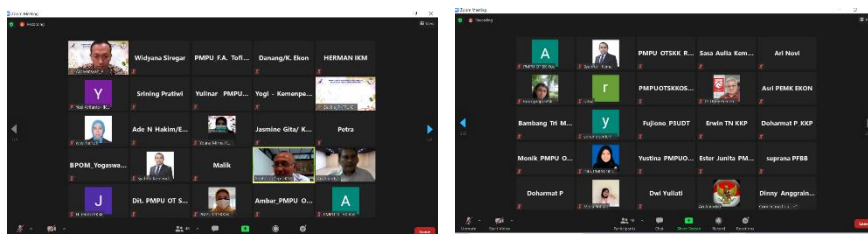
v. Dokumentasi kegiatan:



Gambar 12. Pertemuan Bersama Fakultas Perikanan dan Kelautan IPB

c. Rapat Koordinasi Pembahasan Kerjasama Diversifikasi Garam Menjadi Garam Kosmetik

- i. Waktu Pelaksanaan: Rabu, 18 Mei 2021
- ii. Tempat Pelaksanaan: Online (Zoom Meeting)
- iii. Peserta Rapat: Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perindustrian; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Kementerian Koperasi dan UKM
- iv. Tujuan Kegiatan Diversifikasi Garam:
 1. Mendampingi partisipasi penabak garam di Lombok dalam melakukan Diversifikasi menjadi usaha garam kosmetik, khususnya pada momentum perhelatan Moto GP tahun 2022.
 2. Meningkatkan taraf ekonomi pembak garam di Lombok
 3. Meningkatkan pengetahuan penabak garam tentang produksi garam kosmetik sesuai standar.
 4. Meningkatkan UMKM kosmetika legal di Lombok.
- v. Dokumentasi Kegiatan:



Gambar 13. Pembahasan Kerjasama Diversifikasi Garam Menjadi Garam Kosmetik

2. Profiling Industri Kosmetik sebagai Basis Upaya Pengembangannya



Kegiatan Profiling Industri kosmetik dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui data pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Kosmetik yang Mutahir dan meningkatnya jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi persyaratan pemenuhan aspek CPKB dan memperoleh sertifikat CPKB serta untuk mengetahui data jumlah UMKM Kosmetik yang mendaftarkan produknya ke Badan POM. Kegiatan ini dilaksanakan karena Industri kosmetik membutuhkan intervensi pemerintah untuk peningkatan daya saing sesuai dengan kondisinya. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat diketahui jumlah termutahir pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kosmetik yang ada di Indonesia sehingga pendampingan yang dilakukan dapat tepat sasaran serta dapat mengetahui perusahaan kosmetik yang legal dan ilegal untuk selanjutnya dapat dilakukan pembinaan agar dihasilkan produk kosmetik yang aman, bermanfaat dan bermutu.

Sasaran Kegiatan 5	Meningkatnya pelayanan publik di bidang OT, SK dan Kos
Indikator Kinerja Utama 1	Tingkat efektivitas KIE OT, Kos dan SK

Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah:

KIE Pemberdayaan Masyarakat terkait Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

KIE yang dilaksanakan dengan mitra Badan POM yaitu anggota Komisi IX DPR RI merupakan kegiatan berkelanjutan yang dilaksanakan rutin setiap tahun, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pemberantasan obat ilegal dan penyalahgunaan obat sehingga diharapkan bisa menjadi Agent of Change untuk lingkungan terdekatnya. Pada masa pandemi COVID 19, kegiatan ini dilaksanakan mengikuti Kebijakan Tatanan Normal Baru dengan menerapkan protokol kesehatan dengan

ketat yaitu cek suhu, penggunaan hand sanitizer, peserta wajib menggunakan masker dan tempat duduk di lokasi kegiatan diatur agar *physical distancing* tetap bisa diterapkan.

Metode yang dilakukan pada KIE bersama TOMAS Tatanan Normal Baru melalui penyampaian materi oleh narasumber serta pendistribusian *goodie bag* bagi masyarakat yang berisi APD berupa hand sanitizer dan masker. Materi KIE yang disampaikan adalah Penggunaan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Aman.

Tahun 2021 kegiatan KIE bersama TOMAS dilaksanakan bersama 3 (tiga) TOMAS yaitu H. Hasan Saleh di Tarakan, Kris Dayanti di Malang, dan Hj. Nur Nadlifah, S.Ag., M.Ag. di daerah Brebes dan Tegal, dengan rincian terlampir:

A. Tokoh masyarakat H. Hasan Saleh

No	Tanggal Pelaksanaan KIE	Lokasi KIE	Jumlah Peserta
1.	12 April 2021	Tarakan Utara	500 orang
2.	12 April 2021	Tarakan Tengah	500 orang

B. Tokoh masyarakat Kris Dayanti

No	Tanggal Pelaksanaan KIE	Lokasi KIE	Jumlah Peserta
1.	20 Oktober 2021	Wajak, Kab. Malang	500 orang
2.	21 Oktober 2021	Poncokusumo, Kab. Malang	500 orang
3.	31 Oktober 2021	Kab Malang	500 orang

C. Tokoh masyarakat Hj. Nur Nadlifah, S.Ag., M.Ag.

No	Tanggal Pelaksanaan KIE	Lokasi KIE	Jumlah Peserta
1.	15 Oktober 2021	Brebes	500 orang
2.	16 Oktober 2021	Magelang	500 orang
3.	23-24 Oktober 2021	Tegal	500 orang
4.	29-30 Oktober 2021	Tegal	500 orang
5.	13-14 November 2021	Brebes	500 orang





Gambar 14. Kegiatan KIE Tomas

Sasaran Kegiatan 5	Meningkatnya pelayanan publik di bidang OT, SK dan Kos
Indikator Kinerja Utama 2	Indeks pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha OT, Kos dan SK

Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah:

Eksplorasi Tanaman Obat Indonesia Berbasis Kearifan Lokal

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Napak Tilas Jejak Empiris. Tahapan kegiatan ini terdiri dari webinar pra sarasehan dan sarasehan Jamu Nusantara. Tema webinar Pra sarasehan adalah Mengenal Jamu Nusantara: Eksplorasi Obat Tradisional Berbahan Alam Indonesia. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 8 September 2022 secara hybrid di Hotel Aryaduta Jakarta dan aplikasi zoom meeting. Kegiatan ini diikuti lebih dari 1200 peserta.

Kegiatan dibuka oleh Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, Dra. Reri Indriani, Apt., M.Si. Narasumber yang menyapaikan materi berasal dari akademisi di berbagai yaitu :

1. Prof. Dr. Marlina Silalahi, S. Pd, M.Si. (Akademisi dari UKI-Jakarta dan peneliti etnomedisin) judul materi "Inventarisasi Jamu Nusantara Melalui Eksplorasi Etnomedisin (Khususnya Sumatera Utara)," oleh
2. Prof. Dr. Suwijiyo Pramono, DEA, Apt. (Akademisi dari Fakultas Farmasi UGM, Yogyakarta) judul materi "Data Empiris Sebagai Bukti Keamanan Jamu Nusantara" oleh
3. Putu Ayu Saraswati, S. Ked. (Putri Indonesia Runner Up 2 dari Bali
4. Darius Sinathrya (Artis)

Paparan dari narasumber ditanggapi oleh Kementerian/Lembaga/Asosiasi terkait yaitu :

1. Asdep Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Kemenko PMK, Dra. Molly Prabawaty, M. AP
2. Asdep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan Kemenko Perek, Chairul Saleh, SH., LL.M.
3. Direktur Pemasaran Ekonomi Kreatif Kemenparekraft, Endang Susilowati, SH
4. Kepala B2P2TOOT, Kemenkes, Akhmad Saikhu, M.Sc. PH:
5. Perwakilan dari Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bapennas, Puspita Suryaningtyas, S.P, MGES
6. P Jamu Pusat, Dwi Ranny Pertiwi Zarman, SE., MH
7. Jamu Digital, Karyanto

Kesimpulan kegiatan ini adalah Jamu nusantara dapat diartikan tidak saja jamu yang pada umumnya dikenal, namun juga pada kenyataannya ada juga sebagai pangan, sebagai bumbu atau rempah-rempah. Fungsi jamu pun sudah meningkat tidak saja sebagai pemelihara kesehatan namun juga langsung dan tidak langsung dapat sebagai pemelihara daya tahan tubuh (imunitas). Kendala tetapi juga sekaligus tantangan tentang jamu sebagai pemelihara kesehatan secara etnomedicin antara lain belum terstandarnya pengolahan bahan alam dan/atau penggunaan bahan alam sebagai pemelihara kesehatan. Hal lain bahwa pengembangan bahan alam juga belum mendapatkan kesempatan untuk dieksplorasi oleh keturunannya. Termasuk di dalamnya adalah kemasan belum tersentuh modernisasi dan belum banyak yang mendapatkan nomor izin edar. Banyak sekali bahan alam dari Papua yang berpotensi sebagai bahan obat. Definisi jamu ditinjau dari beberapa aspek. Jamu merupakan ramuan bahan alam. Namun demikian, pengolahan bahan alam ada yang diproduksi secara industri dan ada juga yang diproduksi dengan skala masyarakat. Untuk jamu, sudah pasti tidak boleh mengandung bahan toksik dan tidak boleh mengandung bahan kimia obat.

Tindak Lanjut yang harus dilakukan antara lain perlu dilakukan kajian tentang kapan suatu bahan alam dapat dikatakan sebagai "jamu," karena tidak semua bahan alam yang sekalipun diolah oleh masyarakat dan kemudian diramu dapat disebut langsung sebagai jamu; atukah harus melalui pembuktian secara empiris sampai 3 (tiga) generasi atau telah digunakan selama 50 (lima puluh tahun), atau hanya berbasis pada penelitian uji pra klinik dan uji klinik; Survei etnomedisine untuk dapat mengindustrialisasi jamu, contoh akar kuning tidak dapat diindustrialisasi karena penghilangan hepatotoksik pada senyawa akar kuning hanya dapat hilang dengan direbus menggunakan air payau atau perlu dilakukan upaya teknologi untuk hal tersebut perlu dukungan seluruh provinsi agar Indonesia dapat ditetapkan sebagai jalur rempah pada tahun 2024, Perlunya portal data base tananam obat tradisional dan literasi

tanaman obat tradisional didalam kurikulum Pendidikan, Perlunya perkuatan 13 K/L dalam eksplorasi obat tradisional berbahan alam Indonesia



Gambar 15. Webinar Pra Sarasehan

Sarasehan Jamu Nusantara dengan tema Jejak Empiris: dengan Pemanfaatan IPTEK Mendukung Daya Saing Produk Herbal Nasional. Kegiatan dibuka oleh Kepala Badan POM RI, Dr. Penny K. Lukito, MCP dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang diwakili oleh Sekretaris Daerah DIY, Drs. Kadarmanta Baskara Aji. Kegiatan juga dihadiri perwakilan Pemerintah DIY, Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) DIY, Gabungan Pengusaha Jamu (GP Jamu) DIY, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) obat tradisional, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM di seluruh Indonesia baik secara daring maupun luring.

Rangkaian kegiatan tersebut antara lain penyerahan sertifikat nomor izin edar obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika, dan pangan olahan; sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) serta Cara Pembuatan Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) kepada beberapa pelaku usaha. Selain itu dilakukan stikerisasi jamu gendong sebagai bagian dari pembinaan dan pendampingan Badan POM terhadap pelaku usaha jamu gendong untuk memastikan produk jamu gendong yang dihasilkan telah memenuhi sanitasi, higienitas, komposisi yang benar, dan mutu yang terjamin serta dilakukan penyerahan bantuan alat kepada jamu gendong yang merupakan bagian dari program Orang Tua Angkat Jamu Badan POM bersama industri obat tradisional. Serta pameran UMKM Jamu, Kosmetik dan Pangan.

Pada kegiatan sarasehan ini juga dilakukan dialog tentang jamu nusantara yang menghadirkan para pakar dari GP Jamu Pusat, perwakilan akademisi dari beberapa wilayah Indonesia serta beberapa industri obat tradisional sebagai narasumber, dengan penanggung

berasal dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Tindak lanjut kegiatan ini adalah membuat surat edaran agar Setiap UPT BPOM bersama lintas sektor terkait dapat memfasilitasi kegiatan tersebut dan memberikan bimbingan terhadap pelaku usaha UMKM Obat Tradisional sehingga berkembang dan mempunyai nilai tambah dan daya saing produk dengan terdaftar sebagai Jamu, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka. Seluruh wilayah Indonesia memiliki potensi keanekaragaman hayati, herbal, flora, dan fauna yang berpotensi menjadi obat. Setiap kegiatan akan selalu membawa progress, yang pertama adalah untuk mendampingi produk jamu dan fitofarmaka agar mampu mendokumentasikan bukti empiris produknya, dan nantinya akan ada pendalaman oleh peneliti dari masing-masing wilayah. Dengan begitu, dapat dicapai hasil sesuai dengan upaya pemerintah, yaitu mencapai kemandirian obat



Gambar 16. Rangkaian Pembukaan Sarasehan Jamu Nusantara

Narasumber yang hadir secara daring: Dr. Yahya Kadir MS., (Program Studi Antropologi Universitas Hasanudin), Dwi Ranny Pertiwi Zarman SE, MH (Ketua Umum GP Jamu), Raymond R. Tjandrawinata, Ph.D. (Dexa Laboratories of Biomolecular Sciences) dan Irwan Hidayat (PT Sidomuncul).

Sasaran Kegiatan 6	Meningkatnya pemberdayaan Pemda dan masyarakat dalam program keamanan OT,SK, dan Kos
Indikator Kinerja Utama 1	Jumlah komunitas masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OT, SK, dan Kos

Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah:

Strategi Komunikasi Berbasis Digital dalam Rangka Meningkatkan KIE Kemanan dan Kemanfaatan Kosmetik

Kegiatan ini merupakan upaya Badan POM untuk memperkuat pengawasan post market dengan meningkatkan peran lintas sektor terutama Pemerintah Daerah dalam melakukan pendampingan UMKM Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan pemberdayaan masyarakat. Sinergisitas bersama Pemerintah Daerah berupa advokasi terhadap kemudahan perizinan, akses permodalan dan pasar bagi UMKM. Output berupa rencana aksi program Sinergitas Badan POM Bersama Lintas Sektor Dalam Rangka Pendampingan UMKM dan dukungan Obat Bahan Alam dalam bentuk Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) dan Laporan Hasil Kegiatan

Sasaran Kegiatan 7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, Kos dan SK yang optimal
Indikator Kinerja Utama 1	Indeks RB Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos

Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah:

Internalisasi Reformasi Birokrasi

Internalisasi Reformasi Birokrasi merupakan kegiatan pemaparan terkait reformasi birokrasi yang melibatkan seluruh pegawai di Kedeputian II sehingga diharapkan seluruh pegawai dapat mengetahui dan memahami terkait reformasi birokrasi. Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi zoom dan luring di Hotel Amaroosa, Bekasi.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ibu Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang memberikan sambutan dan arahan. Acara ini juga diisi oleh paparan dari Inspektorat 2 BPOM dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta penayangan video Aoc Kedeputian 2. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen penerapan Reformasi Birokrasi dan juga penandatanganan BA Konsensus Komitmen Tim RB Kedeputian 2 tahun 2021.

Dengan diadakannya kegiatan ini diharapkan seluruh pegawai di Kedeputian II memahami Reformasi Birokrasi yang merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut aspek mental

aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan (organisasi), tata laksana, sumber daya manusia aparatur, peraturan perundang-undangan, dan pelayanan publik.



Gambar 17. Kegiatan Internalisasi Reformasi Birokrasi

Sasaran Kegiatan 8	Terwujudnya SDM Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, Kos dan SK yang berkinerja optimal
Indikator Kinerja Utama 1	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos

Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah:

Pengembangan Kompetensi SDM di Direktorat PMPU OT, SK, Kos

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Standar profesionalitas ASN terdiri dari 4 (Empat) dimensi yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Setiap dimensi mencakup bobot, deskripsi, dan indikator. Peningkatan profesionalitas ASN akan mendorong keberhasilan Reformasi Birokrasi. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik melakukan pengembangan profesionalitas SDM dengan berbagai cara salah satunya yaitu pengembangan manajemen talenta berdasarkan kompetensi dan tingkat Pendidikan sehingga dapat terwujudnya SDM yang berintegritas tinggi, profesional, dan kompeten. Oleh sebab itu demi tercapainya sasaran kegiatan tersebut, Direktorat akan secara optimal untuk melakukan perbaikan dan berkelanjutan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan yaitu:

1. Workshop Strategi Komunikasi

Materi yang disampaikan pada Workshop Strategi Komunikasi adalah komunikasi efektif, kemampuan presentasi dan strategi komunikasi. Workshop diadakan secara hybrid secara daring dan luring di Hotel Salak Bogor pada 5 Mei 2021 dengan narasumber Dr. Hery Margono.

2. Workshop Penyusunan BSC

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik menyelenggarakan Bimbingan Teknis tentang Penyusunan Peta Strategis Level II dengan Metode Balanced Scorecard (BSC) pada 15 Juli 2021 secara daring. Kegiatan ini dilakukan secara daring melalui zoom meeting, dihadiri oleh Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, Ibu Dra. Asih Liza Restanti, Apt, M.Kes dan seluruh ASN di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik. Narasumber dari Sinergi Consulting yakni Bapak Zamrony Madjid, ST, MM.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi ASN dalam hal menyusun peta strategis dalam hal pencapaian target organisasi. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat membantu meningkatkan pengelolaan kinerja Direktorat PMPU OTSKK.

3. Workshop Pembuatan Infografis

Kegiatan Workshop Infografis Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dilaksanakan secara daring lewat Zoom Meeting pada hari Senin, 16 Agustus 2021 mulai pukul 08.00 – selesai, dengan Aryo Hadi sebagai narasumber / fasilitator pelatihan. Diharapkan seluruh pegawai di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dapat mengetahui cara pembuatan infografis sehingga dapat diterapkan dalam mendukung kinerja dalam pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha.

4. Workshop Pelayanan Publik

Pelatihan Pelayanan Publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik adalah untuk menyamakan persepsi, peningkatan kompetensi serta peningkatan kinerja pegawai dan unit Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang tentunya untuk mendukung implementasi Reformasi Birokrasi. Kemampuan dalam pelayanan publik dapat meningkatkan Penilaian Kinerja Pegawai. Workshop Pelayanan Publik diselenggarakan secara zoom meeting pada 18 Agustus 2021.

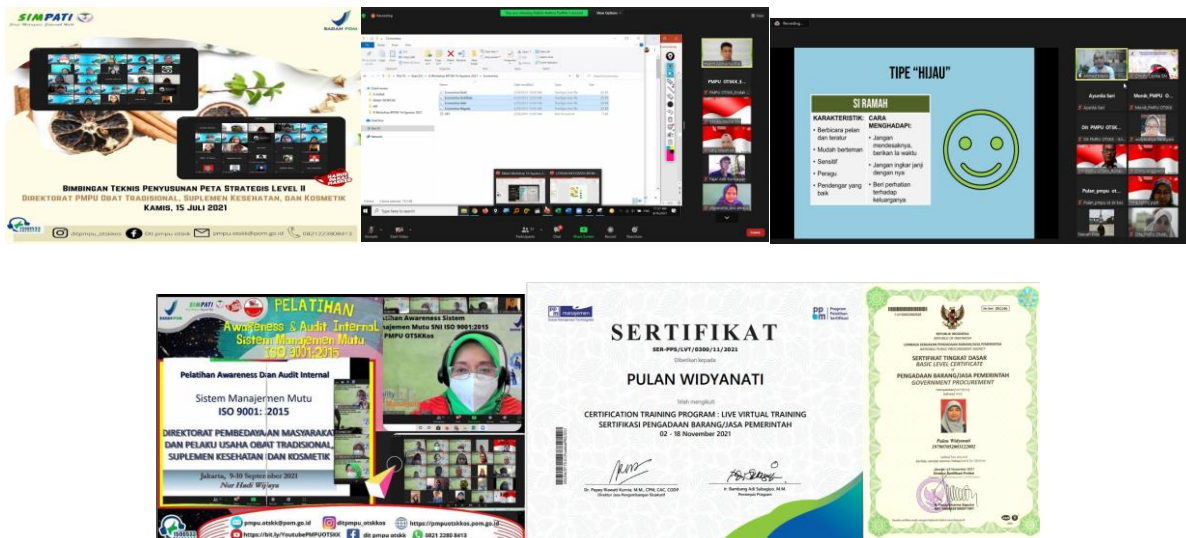
5. Pelatihan Awareness QMS 9001:2015

Pelatihan Awareness Sistem Manajemen Mutu secara online pada Hari Kamis - Jumat, tanggal 9-10 September 2021. Pelatihan ini dibuka oleh Direktur PMPU OTSKK. Narasumber dalam pelatihan ini adalah Nur Hadi Wijaya. STP, MM.

Tujuan kegiatan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 guna meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keunggulan Dit PMPU OTSKK dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

6. Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam rangka peningkatan pengadaan barang dan jasa yang sesuai ketentuan dan akuntabel, di tahun 2021 ada 4 (empat) pegawai yang mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa di PPM Manajemen bekerjasama dengan LKPP.



Gambar 18. Kegiatan Pengembangan Kompetensi

Sasaran Kegiatan 9	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos
Indikator Kinerja Utama 1	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, Kos dan SK yang optimal

Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah:

1. Evaluasi Program Kerja

Evaluasi program kerja merupakan kegiatan yang mendukung kegiatan direktorat dalam melakukan evaluasi kegiatan yang telah dilakukan. Pada kegiatan ini membahas

kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan merencanakan kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya.

2. Perencanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos
Kegiatan ini mengakomodir kegiatan biaya paket data, biaya berlangganan zoom serta biaya pemeriksaan kesehatan pegawai yang dilakukan setahun sekali. Ada dua akun zoom berlangganan pada tahun 2021. Pemeriksaan Kesehatan bagi seluruh pegawai dilakukan pada bulan September 2021.

Sasaran Kegiatan 10	Terkelolanya Keuangan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos secara Akuntabel
Indikator Kinerja Utama 1	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos

Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah:

1. Honor Pengelolaan Keuangan Dit. PMPU
Honor pengelolaan keuangan mengakomodir honor bagi 1 (satu) petugas pengelola Barang Milik Negara (BMN) di Direktorat PMPU OT SK Kos selama 12 (dua belas) bulan
2. Sewa Rumah Dinas Jabatan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha
Perencanaan pengadaan langsung Jasa Sewa Rumah Dinas Jabatan Direktorat PMPU OT SK dan Kosmetik tahun 2021 dilakukan dengan melihat keadaan direktur yang berasal dari luar Jakarta dan domisili di luar Jakarta sehingga memerlukan rumah atau tempat tinggal di Jakarta sehingga dilakukan Sewa Rumah Dinas Jabatan. Berdasar Peraturan Badan POM nomor 15 tahun 2021 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Rumah Dinas adalah bangunan gedung beserta kelengkapannya untuk tempat tinggal bagi pejabat tertentu dalam masa tertentu. Badan POM tidak punya rumah dinas sehingga perlu dilakukan sewa. Mengingat di tengah kota Jakarta agak susah mendapat rumah sehingga dilakukan mencari apartemen sebagai sewa rumah dinas jabatan. Sewa rumah dinas jabatan dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan.
3. Layanan Perkantoran Direktorat PMPU OT, SK, Kos
Layanan Perkantoran digunakan untuk membiayai keperluan sehari-hari pada Direktorat PMPU Obat Tradisional, SK dan Kosmetik yang menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar dapat memberikan pelayanan secara optimal, seperti barang cetak, air minum pegawai.

4. Honor Pramubakti Direktorat PMPU OT, SK, Kos

Biro Umum hanya mengakomodir 7 (tujuh) orang honor pramubakti, padahal masih dibutuhkan 1 (satu) orang pramubakti untuk membantu terkait pengelola keuangan dan arsiparis. Sehingga kegiatan ini mengakomodir honor pramubakti 1 (satu) orang selama 12 (dua belas) bulan dengan 1 (satu) kali THR

5. Pemeliharaan kendaraan operasional Direktorat Pengawasan OT dan SK

Setiap kendaraan memerlukan perawatan untuk menjaga performance dari kendaraan tersebut. Terbatasnya anggaran dari Biro Umum, maka unit juga mempersiapkan anggaran untuk pemeliharaan kendaraan operasional.

Kendaraan yang terdiri dari :

- Satu Kendaraan dinas yang digunakan Direktur
- Satu Kendaraan operasional yang digunakan untuk operasional

6. Penanganan Pandemi Covid-19 Di Direktorat PMPU OT, SK, Kos

Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Direktorat PMPU OT, SK, Kos untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap hal tersebut maka pegawai di Dit PMPU OT SK Kos perlu dibekali dengan penambah daya tahan tubuh dan masker serta pemeriksaan awal terhadap covid 19 bila ada gejala ataupun terpapar (tes swab PCR/antigen) bahkan penanganan isolasi mandiri di suatu tempat (hotel) bila diperlukan.

BAB 4 PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada tahun 2021, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik telah melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sesuai dengan perencanaan, menggunakan anggaran dengan tepat, terdapat beberapa capaian kinerja yang melebihi target yang ditetapkan serta ada juga yang masih kurang.

Realisasi Anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2021 sebesar 100%

Indikator kinerja utama yang masih belum mencapai target adalah:

- Tingkat efektivitas KIE OT, Kos dan SK dengan realisasi sebesar 90% dan target 90,59% dengan capaian realiasi 99,35%. Perlu adanya peningkatan asistensi terhadap pelaksanaan KIE serta meningkatkan pelaksanaan KIE dengan berbagai media dalam mengatasi hal tersebut.
- Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos yang optimal dimana realisasi 1 dan target 2 dengan capaian realiasi terhadap target 50%. Di tahun 2022, diharapkan bisa mencapai target dengan belajar dari tahun 2021 yaitu dengan aktif memanfaatkan email corporate bagi seluruh pegawai serta mengupdate data di BOC. Cara mengatasinya adalah dengan memantau setiap pertengahan bulan untuk pemanfaatan email corporate bagi semua pegawai.

Sebagai unit pelayanan publik yang baru, di tahun 2021 telah dilakukan penilaian Indeks Unit Pelayanan Publik dengan nilai 3,57 (baik) sebagai baseline. Perlunya pendampingan serta asistensi dari Biro Hukum dan Organisasi terkait hal-hal yang perlu disiapkan sebagai Unit Pelayanan Publik yang baik sehingga nilai indeks UPP bisa memperoleh predikat sangat baik (>4).

B. Saran

Sebagai unit baru, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik perlu usaha dalam meningkatkan kinerjanya sehingga dapat tercapai target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya. Usaha tersebut dapat terwujud dengan:

- Meningkatkan komitmen yang kuat dari pimpinan hingga seluruh pegawai yang terlibat sehingga mampu mengidentifikasi kendala agar tidak mengganggu pencapaian target yang ditetapkan serta terus menjaga komitmen janji layanan
- Meningkatkan kompetensi SDM dengan pelatihan-pelatihan serta penugasan.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2021

No.	Program/Kegiatan/ Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
1	6385 Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik				7.654.120.000	7.653.989.556	100%
2	6385.BDD.001 Komunitas masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OT, SK dan Kos	40	42	105,0%	1.113.138.000	1.113.113.220	100%
3	6385.BDG.001 UMKM Kosmetik yang sesuai standar	25	28	112,00%	3.097.091.000	3.097.015.016	99,99%
4	6385.QDG.001 UMKM OT yang sesuai Standar	50	51	102,00%	3.443.891.000	3.443.861.320	100%

Lampiran 2

Capaian Kinerja per Sasaran Strategis Tahun 2021

No	SK	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Volume				Anggaran			
				Target tahunan	TW 4	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
STAKEHOLDER PERSPEKTIF											
1	SK1	Pelayanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha yang prima	IKK1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos (target 80%)	80%	80%	80%	80%	506.086.000	506.083.960	100,00%
2	SK2	Meningkatnya kesadaran pemerintah daerah dan masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu OT, SK dan Kos	IKK2.1	Persentase Pemda yang menerapkan program keamanan OT, SK dan Kos	45%	45%	45%	100,00%	121.257.000	121.252.415	100,00%
			IKK2.2	Persentase duta yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat	82%	82%	82%	100,00%	930.294.000	930.288.486	100,00%
INTERNAL PROSES PERSPEKTIF											
3	SK3	Meningkatnya koordinasi dengan pemda dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, pendampingan UMKM dan penerapan keamanan OT, SK, dan Kos	IKK3.1	Persentase pemda yang diintervensi dalam rangka pendampingan UMKM dan penerapan keamanan OT, Kos dan SK	73%	73%	73%	100,00%	217.960.000	217.902.375	99,97%
			IKK3.2	Persentase pemda yang diintervensi dalam pemberdayaan masyarakat di bidang keamanan OT, SK, dan Kos	45%	45%	45%	100,00%	803.193.000	803.184.571	100,00%
4	SK4	Meningkatnya Kapasitas UPT BPOM dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha OT, SK dan Kos	IKK4.1	Persentase UMKM OT yang memenuhi standar (s/d 2021)	87%	87%	102,00%	117,24%	1.281.459.000	1.281.440.122	100,00%
			IKK4.2	Persentase UMKM Kos yang memenuhi standar (s/d 2021)	70%	70%	70%	100,00%	301.319.000	301.314.009	100,00%
5	SK5	Meningkatnya pelayanan publik di bidang OT, SK dan Kos	IKK5.1	Tingkat efektivitas KIE OT, Kos dan SK	90,59%	90,59%	90%	99%	2.148.552.000	2.148.542.023	100,00%
			IKK5.2	Indeks pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha OT, Kos dan SK	3,57	3,57	3,57	100%	506.086.000	506.083.960	100,00%
6	SK6	Meningkatnya pemberdayaan Pemda dan masyarakat dalam program keamanan OT, SK, dan Kos	IKK6.1	Jumlah komunitas masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OT, SK, dan Kos	40	40	42	105%	37.521.000	37.520.300	100,00%
Learning and Growth Perspective											
7	SK7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, Kos dan SK yang optimal	IKK7.1	Indeks RB Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	80	80	75	94%	34.485.000	34.485.000	100,00%
8	SK8	Terwujudnya SDM Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, Kos dan SK yang berkinerja optimal	IKK8.1	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	77	77	83	108%	141.920.000	141.920.000	100,00%
9	SK9	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengemasan Obat dan Makanan di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	IKK9.1	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, Kos dan SK yang optimal	2	2	1	50%	262.942.000	262.940.724	100,00%
10	SK10	Terkelolanya Keuangan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos secara Akuntabel	IKK10.1	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	Efsien (99%)	99%	100%	101%	371.046.000	371.031.612	100,00%

Lampiran 3

Hasil pemantauan peningkatan kompetensi minimal 20 JP pegawai tahun 2021

No	NIP	NAMA	UNIT	JUMLAH JP
1	2	3	4	5
1	19950825 202012 2 001	Endah Fitri Untari, S	Direktorat Pemberday	261
2	19690515 199203 2 002	Naisah Pide	Direktorat Pemberday	67
3	19770225 199603 2 001	Sri Lestari Mukti Ra	Direktorat Pemberday	274
4	19900618 201402 2 003	Ester Junita Sinaga	Direktorat Pemberday	198
5	19960516 202012 2 002	Meilinda Eka Rusti'	Direktorat Pemberday	145
6	19650127 199303 2 001	Dra. Yohana Sente	Direktorat Pemberday	229
7	19721024 199903 2 002	Yustina Muliani Bud	Direktorat Pemberday	289
8	19850204 200912 2 005	Ida Farida, S.Si, Ap	Direktorat Pemberday	139
9	19801202 200501 2 001	Widihastuti, S.Farm	Direktorat Pemberday	251
10	19690211 199503 2 002	Dra. Asih Liza Rest	Direktorat Pemberday	179
11	19811120 200604 2 006	Ari Novianti Nugroh	Direktorat Pemberday	145
12	19881130 201502 2 001	Christy Cecilia Sina	Direktorat Pemberday	230
13	19930901 201801 1 001	Yogaswara Tawang	Direktorat Pemberday	153
14	19870109 200912 2 005	Rona Monika Sihak	Direktorat Pemberday	279
15	19940809 202012 2 001	Widyana Siregar, S	Direktorat Pemberday	335
16	19671012 199303 2 001	Dr. Fadjar Aju Tofia	Direktorat Pemberday	174
17	19651023 199203 2 001	Dra. Nelvya Roza,	Direktorat Pemberday	303
18	19640817 199303 1 002	Drs. Ronaldi Zainoe	Direktorat Pemberday	98
19	19651003 199312 1 001	Drs. Slamet Sukarn	Direktorat Pemberday	217
20	19800730 200604 2 002	Wiwi Hartuti, S.Farm	Direktorat Pemberday	239
21	19790612 200604 2 001	Dinny Anggraini, S.	Direktorat Pemberday	99
22	19800817 200604 2 041	Yoana Mima, S.Si,	Direktorat Pemberday	157
23	19811227 200712 1 001	Ardiyansyah Kahuri	Direktorat Pemberday	120
24	19921215 201903 2 005	Dita Yustine Winda	Direktorat Pemberday	437
25	19710218 199303 2 001	Yulinar, SKM, M.Si	Direktorat Pemberday	135
26	19860521 200812 2 001	Widya Cahyaningty	Direktorat Pemberday	92
27	19790705 200312 2 002	Pulan Widyanati, S.	Direktorat Pemberday	237
28	19870304 201012 2 002	Dewi Setyowulan, S	Direktorat Pemberday	170
29	19650722 199203 2 001	Erika Nurhayati Par	Direktorat Pemberday	164
30	19820924 200604 2 018	Fitria Rahmi, S.Farm	Direktorat Pemberday	285
31	19760118 200312 2 002	Ambar Setyorini, S	Direktorat Pemberday	200
32	19751107 200312 2 002	Mastiur Hutagaol, S	Direktorat Pemberday	143

Lampiran 4

Rekap Barang Milik Negara
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan dan Kosmetik
Tahun 2021

Kode Barang	Nama Barang	No. Urut Pendaftaran	Merk/Type	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Satuan Barang
3.10.01.02.002	Laptop	280	Lenovo Yoga Slim - 7	2021	1	Buah
3.10.01.01.007	PC Workstation	75	AIO LENOVO 3 24ITL6-A0ID C17-1165G7/2X4GB/512GB/MX4 50 2GB/DVD/23.8/WIN10+OHS/BLACK	2021	1	Buah
3.10.01.02.009	Tablet	7	Samsung A7	2021	1	Buah
3.10.01.02.002	Laptop	221	DELL Inspiron 5406	2021	1	Buah
3.10.01.02.002	Laptop	220	DELL Inspiron 5406 (core i7-1165G7 - Gray	2021	1	Buah
3.10.01.02.002	Laptop	218	DELL Inspiron 5406 (core i7-1165G7 - Gray	2021	1	Buah
3.10.01.02.002	Laptop	285	Asus P2451FB	2021	1	Buah
3.10.01.02.002	Laptop	286	Asus P2451FB	2021	1	Buah
3.10.01.02.002	Laptop	287	Asus P2451FB	2021	1	Buah
3.10.01.02.002	Laptop	288	Asus P2451FB	2021	1	Buah
3.10.02.03.003	Printer	335	HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One [CZ992A]	2021	1	Buah
3.10.01.01.007	PC	76	AIO LENOVO 3 24ITL6-A0ID C17-1165G7/2X4GB/512GB/MX4 50 2GB/DVD/23.8/WIN10+OHS/BLACK	2021	1	Buah
3.10.02.03.004	Scanner	44	EPSON Portable Business Scanner Wi-Fi DS-360W	2021	1	Buah
3.05.01.05.048	LCD Projector	23	INFOCUS Projector IN114XV	2021	1	Buah
3.06.01.02.165	Camera Conference	3	Logitech Group	2021	1	Buah
3.06.01.02.128	Kamera	18	Canon	2021	1	Buah
3.10.01.02.002	Laptop	219	DELL Inspiron 5406 (core i7-1165G7 - Gray	2021	1	Buah
3.10.01.02.002	Laptop	222	DELL Inspiron 5406 (core i7-1165G7 - Gray	2021	1	Buah
3.10.01.02.002	Laptop	223	DELL Inspiron 5406 (core i7-1165G7 - Gray	2021	1	Buah
3.10.01.02.002	Laptop	224	DELL Inspiron 5406 (core i7-1165G7 - Gray	2021	1	Buah
3.10.01.02.002	Laptop	225	DELL Inspiron 5406 (core i7-1165G7 - Gray	2021	1	Buah
3.10.01.01.007	PC	77	AIO LENOVO 3 24ITL6-A0ID C17-1165G7/2X4GB/512GB/MX4 50 2GB/DVD/23.8/WIN10+OHS/BLACK	2021	1	Buah
3.10.02.03.004	Scanner	55	ADS 1700 W	2021	1	Buah
3.10.01.02.002	Laptop	281	Asus P2451FB	2021	1	Buah
3.10.01.02.002	Laptop	282	Asus P2451FB	2021	1	Buah
3.10.01.02.002	Laptop	283	Asus P2451FB	2021	1	Buah
3.10.01.02.002	Laptop	284	Asus P2451FB	2021	1	Buah

3.10.01.02.002	Laptop	226	DELL Inspiron 5406 (core i7-1165G7 - Gray	2021	1	Buah
3.10.01.02.002	Laptop	227	DELL Inspiron 5406 (core i7-1165G7 - Gray	2021	1	Buah
3.10.01.02.002	Laptop	289	Asus P2451FB	2021	1	Buah
3.10.01.02.002	Laptop	290	Asus P2451FB	2021	1	Buah
3.10.01.02.002	Laptop	291	Asus P2451FB	2021	1	Buah
3.10.01.02.002	Laptop	292	Asus P2451FB	2021	1	Buah
3.10.01.02.002	Laptop	293	Asus P2451FB	2021	1	Buah
3.10.02.03.003	Printer	337	HP Smart Tank 515 All-in-One Printer	2021	1	Buah
3.10.02.03.003	Printer	338	HP OfficeJet 250 Mobile AIO	2021	1	Buah
3.10.02.03.004	Scanner	57	ADS 1700 W	2021	1	Buah
3.10.02.03.003	Printer	336	HP Smart Tank 515 All-in-One Printer	2021	1	Buah
3.10.02.03.003	Printer	339	HP OfficeJet 250 Mobile AIO	2021	1	Buah
3.10.02.03.004	Scanner	56	ADS 1700 W	2021	1	Buah
3.10.01.02.002	Laptop	294	Asus P2451FB	2021	1	Buah
3.10.01.02.002	Laptop	295	Asus P2451FB	2021	1	Buah
3.10.01.02.002	Laptop	296	Asus P2451FB	2021	1	Buah
3.10.01.02.002	Laptop	297	Asus P2451FB	2021	1	Buah
3.10.01.02.002	Laptop	298	Asus P2451FB	2021	1	Buah
3.10.01.02.002	Laptop	299	Asus P2451FB	2021	1	Buah